

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 633/HK.01.01/K.BA/11/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI NOMOR: 012/HK.01.01/K.BA/08/2022 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI BALI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Bali Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 017/BA.PLENO/VIII/2022 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dari Unsur Bawaslu Provinsi Bali;
7. Surat Kepolisian Daerah Bali Nomor: B/5980/VII/OPS.1.1.1./2022 perihal nama Personel Polda Bali yang ditunjuk sebagai Sentra Gakkumdu;
8. Surat Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B – 1522/N.1.4/Es/08/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Bali;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022;
10. Surat Kepolisian Daerah Bali Nomor: B/558/II/OPS.1.1.1./2023/Diterskrimum Perihal: Personil Pengganti;
11. Surat Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: 069/PP.01.01/K.BA/03/2023;
12. Surat Kepolisian Daerah Bali Nomor: B/6819/VIII/OPS.1.1.1./2023 tertanggal 16 Agustus 2023 Perihal Pergantian nama personel;
13. Surat Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-385/C/08/2023 Tertanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Surat Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-516/C/10/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN KEENAM STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI BALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra

Gakkumdu) Provinsi Bali Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Bali, melakukan pembinaan dan supervisi kepada Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 pada nomor 115.01.2.686353/2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 November 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR :
 633/HK.01.01/K.BA/11/2023
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
 NOMOR: 012/HK.01.01/K.BA/08/2022 TENTANG
 STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
 HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI
 BALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI BALI**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA, S.H	PENASEHAT	KETUA BAWASLU BALI
2	IDA BAGUS KD PUTRA NARENDRA, S.I.K., M.Si	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
3	DR. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI
4	KETUT ARIYANI, S.E.,M.M.,M.H	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU BALI
5	YANRI PARAN SIMARMATA, S.I.K	PEMBINA	DIREKTUR RESKRIMUM POLDA BALI
6	NISLIANUDIN, S.H., M.H.	PEMBINA	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJATI BALI
7	I WAYAN WIRKA, S.H.,M.H	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU BALI
8	NYOMAN SEBUDI, S.E.,S.H	KOORDINATOR	KASUBDIT I DITRESKRIMUM POLD BALI
9	ULIL AZMI, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KOORDINATOR TINDAK PIDANA UMUM KEJATI BALI
TIM PELAKSANA :			
10	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA, S.T	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU BALI
11	GEDE SUTRAWAN, S.Sn.,M.S.n	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU BALI
12	IDA BAGUS PUTU ADINATHA, A.P., M.Si.	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BALI
13	I MADE AJI SWARDHANA, A.P., M.Si.	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN

			SENGKETA PROSES DAN HUKUM
14	NI LUH SUPRI CAHAYANI, S.SOS.,M.AP	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
15	I WAYAN SIDIN	ANGGOTA	KANIT 2 SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA BALI
16	I MADE BUDIYANA, S.H.,M.H.	ANGGOTA	PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA BALI
17	AGUS HARIYADI WIHARJO, S.H.	ANGGOTA	BA UNIT 1 SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA BALI
18	I GEDE MINGGU ARTAWAN, SIP	ANGGOTA	PANIT2 UNIT 2 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA BALI
19	I PUTU AGUS SURYA ATMAJA	ANGGOTA	BANIT 2 SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA BALI
20	I KADEK SANTIKA PUTRA	ANGGOTA	BANIT 2 SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA BALI
21	KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, S.H.,M.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA KEJATI BALI
22	ISA ULINNUHA, S.H.,M.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA TERORISME DAN LINTAS NEGARA KEJATI BALI
23	DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL TINDAK PIDANA UMUM KEJATI BALI
24	NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	KASI NAPZAL KEJATI BALI
25	I MADE DIPa UMBARA, S.H	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJATI BALI
26	PUTU ALFIN K. SUKMADINATA	ANGGOTA	TU KEJATI BALI
27	NI WAYAN WIRYA WATI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
28	OLIVIA GRISELDA SIANTURI, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
29	RIZKI EKA RAHMA NURUL ZAKY,	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI

	S.H..		
30	ELI JULIMAS RAHMAWATI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
31	MONICA PURADA TAMBUNAN, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
32	I GEDE KASMANTARA, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI
33	NI MADE RIA RATNANINGSIH, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU BALI